

Kadisnaker Pusing Upah Sektoral

- ▶ Surat Kesepakatan dengan Pekerja Beredar
- ▶ Cahya: Kami Merasa Ada Konspirasi



Saat menandatangani surat ke wali kota, baik gubernur maupun kadisnaker sudah tahu besoknya akan ada demo. Lantas untuk apa buat surat tersebut, kalau kemudian didemo 200-an orang langsung menyetujui mengeluarkan SK

CAHYA

Ketua Apindo Kepri

BATAM, TRIBUN - Kemelut penetapan upah minimum sektoral Kota (UMSK) Batam 2018 menghangat. Beredar surat kesepakatan antara Pemprov Kepri dan aliansi pekerja. Isinya, pemerintah akan menetapkan UMSK Batam 2018.

Kesepakatan itu merupakan tindak lanjut demo pekerja pada 25 April 2018 di Tanjungpinang.

Ada dua kesepakatan yakni penetapan UMSK Batam serta gubernur akan menetapkan SK UMSK Batam sebelum 1 Mei 2018. Surat kesepakatan ditandatangani lima aliansi pekerja serta Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kepri Tagor Napitupulu.

"Surat kesepakatan itu beredar di medsos (media sosial). Intinya menyetujui segera dikeluarkan SK gubernur mengenai UMSK. Jika ini benar tentu kami sangat heran, kok tiba-tiba kadis-



FOTO: DOK

PEKERJA - Para pekerja keluar dari tempat kerjanya di salah galangan kapal, Kawasan Sekupang, Batam, beberapa waktu lalu.

Kadisnaker Pusing

nik," ujarnya. (kontan)

Sambungan Hal.1

naker begitu mudah membuat kesepakatan seperti itu. Padahal yang demo cuma 200-an orang. Kami merasa ada semacam konspirasi antara kadisnaker dengan serikat pekerja," ujar Ketua Apindo (Aosiasi Pekerja Indonesia) Kepri Cahya.

Dia menegaskan sehari sebelum ada demo, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengeluarkan surat untuk Wali Kota Batam HM Rudi yang isinya belum bisa menyetujui penentuan upah sektoral karena tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 dan rujukannya. Surat itu bernomor 120/0602/DTKT/SET.

Pada 19 Maret 2019, Nurdin juga mengirimkan surat kepada Rudi. Isinya, gubernur belum bisa menetapkan UMSK karena pengusaha dan serikat pekerja belum menemukan kata sepakat.

"Saat menandatangani surat ke wali kota, baik gubernur maupun kadisnaker sudah tahu besoknya ada demo. Lantas untuk apa buat surat tersebut, kalau kemudian karena didemo 200-an orang langsung menyetujui untuk mengeluarkan SK. Kami benar-benar heran, sandiwara apa yang lagi dimainkan," tambah Cahya.

Menurut dia, parapengusaha merasa kecewa jika gubernur menetapkan UMSK, padahal kondisi ekonomi Batam belum pulih. Beban pengusaha akan makin berat. Perusahaan satu per

satu tutup karena tidak bisa bertahan dengan UMK (upah minimum kota) dan memilih hengkang ke Malaysia atau Vietnam.

"Dalam waktu dekat beberapa perusahaan akan menyusul tutup dan pindah ke Vietnam. Foster saja akan menambah 1.200-an pengangguran. Kami berharap gubernur tidak mengeluarkan SK itu, karena selain memperburuk iklim investasi di Batam, juga akan bertolak belakang dengan dua surat yang dikeluarkan sebelumnya," ujarnya.

Kadisnaker Kepri Tagor Napitupulu saat dihubungi mengadu sedang pusing sehingga belum bisa memberikan penjelasan.

"Aduh, saya lagi pusing. Saya tak bisa komentar dulu. Maaf," ungkap Tagor, Minggu (29/4) malam.

Namun ia tidak menjelaskan apakah pusing karena upah sektoral atau masalah lain. Tagor awalnya tidak langsung menjawab telepon. Setelah beberapa kali ditelepon, barulah dia menerima panggilan tersebut.

"Saya sudah tahu ditanya itu. Nanti saya telepon lagi kalau sudah jelas," ucap dia.

Tunduk tekanan

Keputusan antara pemerintah provinsi dengan aliansi pekerja juga menuai sorotan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho mengatakan, sikap bimbang pemprov akan berdampak pada perusahaan dan peng-

usaha.

Udin mengatakan, pemerintah sudah seharusnya mengambil kebijakan agar investor asing bisa nyaman dalam berinvestasi di Batam.

"Ini sama saja menunjukkan ketidak konsistenan dalam mengambil keputusan. Kita khawatir jika kepala daerah tunduk dengan ancaman, maka ke depan akan seperti ini terus jadinya," kata Udin.

Dikatakan dia, ketika berbicara tentang perusahaan, dengan kenaikan upah sektoral, harus dilihat mampunya pengusaha membayar gaji.

"Kalau mau melihat dari beberapa daerah, UMK (upah minimum Kota) Batam sudah termasuk tinggi di Indonesia," ujar Udin.

Seharusnya pemerintah mengontrol harga bahan agar tidak dikuasai mafia.

Kalaupun ada kenaikan gaji, namun harga barang kemudian ikut meninggi, harga bahan pangan tinggi, maka kenaikan gaji sama halnya tidak naik.

Udin menuturkan, seorang kepala daerah dalam mengambil keputusan menaikkan UMK maupun UMKS tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus menjadi bahan evaluasi.

Dan seharusnya, lanjut Udin, kepala daerah juga melihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini untuk dijadikan acuan. (ath/tom/egw)